



BPS PROVINSI GORONTALO

**Laporan Keuangan
(Audited)**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016



Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117

Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597

Homepage : <http://gorontalo.bps.go.id>, E-mail : bps7500@bps.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, 02 MEI 2017
Kepala,

Ir. Eko Marsoro, MM
NIP. 19660625 198802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan – pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran A1	
Lampiran SAIBA	
1. LRA Face	
2. LRA Belanja	
3. LRA Pengembalian Belanja	
4. LRA Pendapatan Negara dan Hibah	
5. LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah	
6. Neraca Face	
7. Neraca SAIBA	

8. Neraca Perbandingan
9. Neraca Percobaan
10. Laporan Operasional
11. Laporan Perubahan Ekuitas

LAMPIRAN SIMAK-BMN

1. CAL-BMN
2. CRBM
3. Laporan Posisi BMN di Neraca
4. Laporan Barang Persediaan dan BA Opname Fisik (Stock Opname) Barang Persediaan
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Intra Komptabel) Periode 31 Desember 2016
6. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Extra Komptabel) Periode 31 Desember 2016
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Gabungan Intra/Extra Kompt) Periode 31 Desember 2016
8. Aset Tak Berwujud
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
10. Laporan Kondisi Barang
11. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (Intra)
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (Extra)
13. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (Gabungan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG PENTING LAINNYA

1. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
2. Surat Pernyataan Rekening
3. Daftar Rekening
4. BA Rekonsiliasi SAIBA dari KPPN
5. BAR Internal antara SAIBA dan SIMAK-BMN
6. BA Rekonsiliasi SIMAK-BMN dengan KPKNL

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN LAINNYA

1. Monitoring UP/TUP
2. SSBP Penyetoran Sisa TUP Tahun Berjalan
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
4. Rekening Koran
5. SPM/SP2D dan SSBP Pengembalian Tahun Berjalan
6. SPM/SP2D dan SSBP Pendapatan PNBPN Tahun Berjalan
7. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2016	17
Tabel 2. Jumlah Pagu Anggaran Menurut Program dan Revisinya Tahun 2016	17
Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	18
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2016 dan 2015	19
Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016	19
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016 dan 2015	20
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 2015	21
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 2015	21
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2016 dan 2015	22
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015	22
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015	23
Tabel 12. Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2016 dan 2015	24
Tabel 13. Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015	24
Tabel 14. Rincian Tanah	25
Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
Tabel 16. Rincian Aset Tak berwujud	30
Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	31
Tabel 18. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	31
Tabel 19. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015	32
Tabel 20. Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015	32
Tabel 21. Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015	33
Tabel 22. Rincian Beban Jasa TA 2016 dan 2015	33
Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015	34
Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015	34
Tabel 25. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015	35
Tabel 26. Rincian Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015	35
Tabel 27. Rincian Koreksi Aset Tetap non Revaluasi TA 2016	36
Tabel 28. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	37
Tabel 29. Rincian Transfer Masuk/Keluar Tahun 2016	37

Tabel 30. Rincian Hibah Barang TA 2016	38
Tabel 31. Daftar Kerjasama Dengan Instansi Lain	39

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Jl. Prof. Dr. ALOEI SABOE No. 117 KOTA GORONTALO
TELEPON (0435)834596, FAXIMILE (0435)834597

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan (Audited) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Gorontalo, 02 Mei 2017
Kepala BPS Provinsi Gorontalo,



Ir. Eko Marsoro, MM.
NIP. 19660625 198802 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan tahun 2016 (Audited) kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah PMK Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.788.200. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.811.973.540. atau mencapai 89,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.890.980.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.183.647.718. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp332.400.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.609.907.322.; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp573.407.996.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp190.591.663. dan Rp18.993.056.055.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.188.200., sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11,425,499,119. sehingga

terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(11,418,310,919). Kegiatan Non Operasional mengalami surplus sebesar Rp.3.513.150. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(11,414,797,769)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp22.395.613.724. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(11,414,797,769). kemudian ditambah dengan Koreksi nilai Aset non revaluasi senilai Rp(731,908,299)., dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.744.148.399. kemudian dikurang dengan penurunan ekuitas senilai Rp(3.402.557.669). sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp18,993,056,055.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-16		% thd Angg	31-Des-15
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.1	-	10.788.200	0,00	47.336.405
JUMLAH PENDAPATAN		-	10.788.200	0,00	47.336.405
BELANJA	C.2.				
Belanja Pegawai	C.3	5.650.039.000	5.314.350.307	94,06	4.487.168.805
Belanja Barang	C.4	3.956.941.000	3.230.243.833	81,63	5.299.970.984
Belanja Modal	C.5	284.000.000	267.379.400	94,15	2.897.949.066
JUMLAH BELANJA		9.890.980.000	8.811.973.540	89,09	12.685.088.855

II. NERACA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	D.1	-	33.965.250
Persediaan	D.2	332.400	328.466.074
Jumlah Aset Lancar		332.400	362.431.324
ASET TETAP			
Tanah	D.3	510.389.050	510.389.050
Peralatan dan Mesin	D.4	12.725.410.760	13.930.390.253
Gedung dan Bangunan	D.5	14.869.074.051	14.620.224.051
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.6	-	22.000.000
Aset Tetap Lainnya	D.7	167.293.209	162.639.751
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.8	(9.662.259.748)	(7.557.474.501)
Jumlah Aset Tetap		18.609.907.322	21.688.168.604
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	D.9	1.350.315.052	521.261.552
Aset Lain-Lain	D.10	63.568.384	169.275.028
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.11	(840.475.440)	(155.310.164)
Jumlah Aset Lainnya		573.407.996	535.226.416
JUMLAH ASET		19.183.647.718	22.585.826.344
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	D.12	190.591.663	190.212.620
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		190.591.663	190.212.620
JUMLAH KEWAJIBAN		190.591.663	190.212.620
EKUITAS			
Ekuitas	D.13	18.993.056.055	22.395.613.724
JUMLAH EKUITAS		18.993.056.055	22.395.613.724
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.183.647.718	22.585.826.344

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan P	E.1	7.188.200	36.574.260
JUMLAH PENDAPATAN		7.188.200	36.574.260
BEBAN			
Beban Pegawai Beban	E.2	5.325.428.780	4.531.594.331
Persediaan Beban	E.3	595.994.069	415.026.944
Barang dan Jasa Beban	E.4	1.639.138.238	2.512.533.207
Pemeliharaan Beban	E.5	298.404.984	350.357.946
Perjalanan Dinas Beban	E.6	889.299.831	1.935.268.383
Barang Untuk Diserahkan Kepada	E.7	-	34.768.450
Beban Penyusutan dan Amor	E.8	2.677.233.217	2.187.960.215
JUMLAH BEBAN		11.425.499.119	11.967.509.476
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.418.310.919)	(11.930.935.216)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.9	605.000	10.762.145
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non		605.000	10.762.145
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASI		3.513.150	10.762.145
SURPLUS/DEFISIT LO		(11.414.797.769)	(11.920.173.071)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	F.1	22.395.613.724	19.312.096.924
SURPLUS/DEFISIT LO	F.2	(11.414.797.769)	(11.920.173.071)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		(731.908.299)	(2.690.027)
Penyesuaian Nilai Aset	F.3	-	(2.690.027)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISI REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		(731.908.299)	-
LAIN- LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		8.744.148.399	15.006.379.899
KENAIKAN/PENURUNAN AKUITAS		(3.402.557.669)	3.083.516.800
EKUITAS AKHIR	F.4	18.993.056.055	22.395.613.725

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo

Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo didirikan sebagai lembaga penyelenggara statistik dasar di Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi Gorontalo ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah. BPS Provinsi Gorontalo berkedudukan di Jl. Prof. Dr.Aloei Saboe No.117 Kota Gorontalo.

Dalam rangka menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019, Kementrian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementrian/Lembaga dengan menyusun visi dan misi Kementrian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJM 2015-2019. Dengan adanya renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementrian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana Strategis disusun berlandaskan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Renstra BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan di bidang statistik di wilayah Provinsi Gorontalo selama lima tahun kedepan. Rencana strategis dirumuskan untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Gorontalo dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo berkomitmen dengan visi “*Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo merumuskan misi yaitu sebagai berikut:

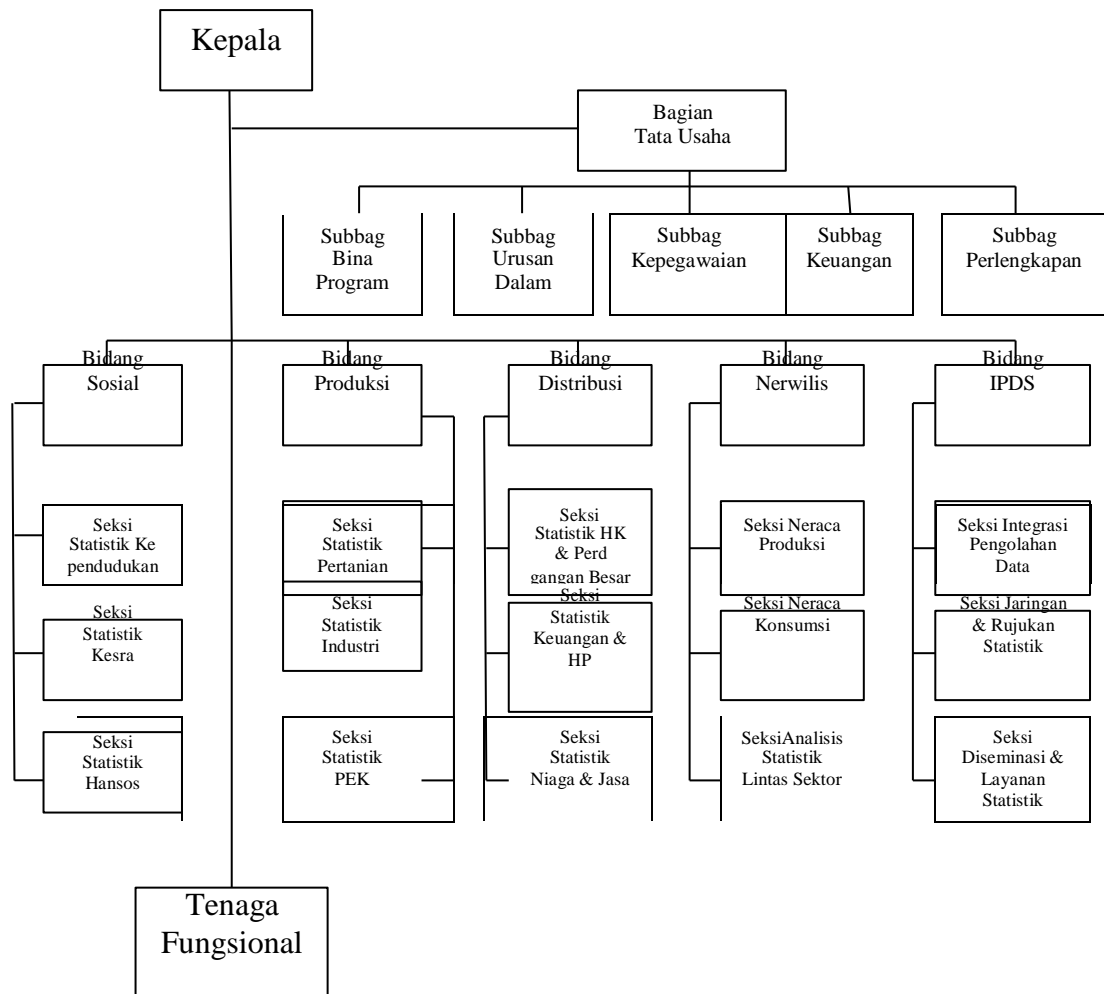
- Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah

untuk kemajuan statistik.

Untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi, dirumuskan tujuan BPS Provinsi Gorontalo 2015-2019 yaitu:

- Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas.
- Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
- Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah BPS Provinsi Gorontalo yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah BPS Provinsi Gorontalo adalah 7 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	7500	BPS Provinsi Gorontalo	-	1	-	-	1
2	7500	BPS Kota Gorontalo	-	1	-	-	1
3	7500	BPS Kabupaten Gorontalo	-	1	-	-	1
4	7500	BPS Kabupaten Gorontalo Utara	-	1	-	-	1
5	7500	BPS Kabupaten Boalemo	-	1	-	-	1
6	7500	BPS Kabupaten Pohuwato	-	1	-	-	1
7	7500	BPS Kabupaten Bonebolango	-	1	-	-	1
Jumlah			-	7	-	-	7

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan dan Hasil Cetakan Lainnya diakui pada saat terjadi transaksi.
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS diakui setelah kerjasama selesai dilaksanakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 1

Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2016

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	10.788.200
Jumlah Pendapatan	-	10.788.200
Belanja		
Belanja Pegawai	3.925.268.000	5.650.039.000
Belanja Barang	5.473.030.000	3.956.941.000
Belanja Modal	411.000.000	284.000.000
Jumlah Belanja	9.809.298.000	9.890.980.000

*Revisi
Anggaran*

B.1. Revisi DIPA BPS Provinsi Gorontalo 2016

BPS Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp9.890.980.000. dengan melakukan revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali selama Tahun 2016. Revisi DIPA BPS Provinsi Gorontalo sampai dengan per 31 Desember 2016 tersebut tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2

Jumlah Pagu Anggaran Menurut Program dan Revisinya

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pagu			
			DMPTTL	PSPA	PPIS	Jumlah
1	07/12/2015	DIPA Awal	5.676.557.000	411.000.000	3.721.741.000	9.809.298.000
2	17/05/2016	Revisi I	5.496.557.000	411.000.000	3.721.741.000	9.629.298.000
3	14/06/2016	Revisi II	5.496.557.000	411.000.000	3.721.741.000	9.629.298.000
4	27/08/2016	Revisi III	6.700.753.000	284.000.000	2.272.127.000	9.256.880.000
5	20/09/2016	Revisi IV	6.700.753.000	284.000.000	2.272.127.000	9.256.880.000
6	21/09/2016	Revisi V	7.334.853.000	284.000.000	2.272.127.000	9.890.980.000

Adapun alasan dilakukannya revisi tersebut dikarenakan :

1. Untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pada satker BPS Kabupaten Gorontalo sebesar Rp180.000.000
2. Revisi DJA dalam rangka pemberian kode blokir (selfblocking) dalam rangka penghematan anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2016
3. Revisi DJA pengurangan pagu anggaran yang telah di selfbloking pada revisi sebelumnya
4. Revisi DJA dalam rangka pemberian kode blokir (selfblocking) dalam rangka penghematan anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 8 tahun 2016
5. Revisi DJA terkait penambahan pagu 51 (Gaji, TK, Lembur) dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai
6. Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian anggaran untuk revisi DIPA petikan halaman III.

*Realisasi
Pendapatan
Rp10.788.200*

B.2 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.788.200. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan negara dan hibah Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo terdiri dari pendapatan dari pengelolaan BMN serta pendapatan dari penjualan publikasi dan pendapatan lain-lain. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari pengelolaan BMN	-	1.590.000	-
2. Pendapatan dari pemanfaatan BMN	-	5.598.200	-
4. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	3.600.000	-
Jumlah	-	10.788.200	-

Pendapatan dari pengelolaan BMN adalah sebesar Rp1.590.000. adalah berupa pendapatan dari hasil penjualan publikasi statistik selama tahun 2016. Pendapatan dari pengelolaan BMN berupa sewa rumah dinas eselon 2 dan

eselon 3 adalah sebesar Rp5.598.200. yang semuanya dibayar melalui potongan gaji setiap bulan. Pendapatan lain-lain berupa pemindahtanganan BMN sebesar Rp3.600.000,

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2016 dan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar (77,21) persen dari realisasi pendapatan per 31 Desember 2015.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan/Pemanfaatan BMN	7.188.200	9.424.260	(23,73)
2. Pendapatan Jasa	-	27.150.000	(100,00)
3. Pendapatan Lain-lain	3.600.000	10.762.145	(66,55)
Jumlah Pendapatan	10.788.200	47.336.405	(77,21)

Realisasi

Belanja

Negara

Rp8.811.973.5

40.

B.3 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada TA 2016 adalah sebesar Rp8.811.973.540 atau 89.9% dari anggaran belanja sebesar Rp9.890.980.000. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp80.236.397. Rincian Anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.650.039.000	5.381.389.704	95,25
Belanja Barang	3.956.941.000	3.243.440.833	81,97
Belanja Modal	284.000.000	267.379.400	94,15
Total Belanja Kotor	9.890.980.000	8.892.209.937	89,90
Pengembalian		(80.236.397)	-
Jumlah	9.890.980.000	8.811.973.540	89,09

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 29,90% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2015 terdapat publisitas persiapan Sensus Ekonomi tahun 2016
2. Terdapat belanja modal yakni pemagaran samping Gedung Kantor.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.381.389.704	4.487.168.805	19,93
Belanja Barang	3.243.440.833	5.299.970.984	(38,80)
Belanja Modal	267.379.400	2.897.949.066	(90,77)
Jumlah	8.892.209.937	12.685.088.855	(29,90)

Belanja
Pegawai
Rp5.381.389.7
04

B.4 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.381.389.704 dan Rp4.487.168.805. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 18,43 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Adanya alokasi belanja pegawai berupa pembayaran gaji ke empatbelas.

Tabel 7
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.911.262.306	2.487.559.875	17,03
Belanja Lembur	-	20.013.000	(100,00)
Belanja Tunj. Khusus /Kegiatan	2.470.127.398	2.004.953.633	23,20
Jumlah Belanja Kotor	5.381.389.704	4.512.526.508	19,25
Pengembalian Belanja Pegawai	(67.039.397)	(25.357.703)	164,37

Belanja

Barang

Rp3.230.243.833.

B.5 Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.230.243.833 dan Rp5.299.970.984. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan (39.05)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penghematan anggaran yang di instruksikan oleh pemerintah.

Tabel 8

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	611.954.099	599.024.370	2,16
Belanja Barang Non Operasional	678.205.195	1.224.591.950	(44,62)
Belanja Jasa	338.910.124	387.002.585	(12,43)
Belanja Pemeliharaan	457.994.484	340.255.946	34,60
Belanja Barang Persediaan	267.077.100	818.905.250	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	889.299.831	1.941.726.383	(54,20)
Jumlah Belanja Kotor	3.243.440.833	5.311.506.484	(38,94)
Pengembalian Belanja	(13.197.000)	(11.535.500)	14,40

Belanja Modal
Rp267.379.400

B.6 Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 267.379.400 dan Rp2.897.949.066. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar (90,77)% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh adanya penghematan anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Peralatan dan Mesin	43.029.400	2.116.636.066	(97,97)
Belanja Gedung dan Bangunan	224.350.000	781.313.000	(71,29)
Jumlah Belanja Kotor	267.379.400	2.897.949.066	(90,77)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	267.379.400	2.897.949.066	(90,77)

B.6.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2016 adalah sebesar Rp43.029.400. mengalami penurunan sebesar (90,77)% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.116.636.066. Hal ini disebabkan oleh penambahan komputer unit 2 buah senilai Rp33.900.000, alat bantu 1 unit senilai Rp3.500.000, alat kantor 4 buah senilai Rp5.179.400, dan alat rumah tangga 1 buah senilai Rp450.000.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	33.900.000	344.408.000	(90,16)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9.129.400	1.772.228.066	(99,48)
Jumlah Belanja Kotor	43.029.400	2.116.636.066	(97,97)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	43.029.400	2.116.636.066	(97,97)

B.6.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp224.350.000. dan Rp781.313.000. Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami penurunan sebesar (71,29)% dibandingkan realisasi TA 2015. Adapun penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2015, terdapat pemagaran gedung, pembuatan tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, serta pos satpam kantor BPS Provinsi Gorontalo, sedangkan tahun 2016 hanya terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal yaitu Rehabilitasi Rumah Dinas Eselon II.

*Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	69.687.000	(100,00)
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	224.350.000	711.626.000	(68,47)
Jumlah Belanja Kotor	224.350.000	781.313.000	(71,29)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.1. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp33.965.250. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

No	Jenis	TA 2016	TA 2015
1	Pembayaran sewa rumah dinas eselon 2	-	25.000.000
2	Pemasangan baliho di Bandara Djalaluddin Gorontalo	-	2.800.000
3	Penyiaran iklan SE2016 di RRI Gorontalo	-	6.165.250
Jumlah		-	33.965.250

*Persediaan
Rp332.400*

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp332.400. dan Rp328.466.074.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2016	TA 2015
Barang Konsumsi	332.400	328.391.074
Bahan untuk pemeliharaan	-	75.000
Jumlah	332.400	328.391.074

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp510.389.050.

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp510.389.050. dan Rp510.389.050. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan nilai aset tetap tanah Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai	Keterangan
1	2	2.050 m	Rp 224,846,000	Bangunan rumah dinas Es.III
2	2	2.382 m	Rp 243,043,050	Bangunan kantor
3	3	392 m	Rp 42,500,000	Bangunan rumah dinas Es.II
Jumlah			Rp 510,389,050	

Semua aset tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi masih terdapat tanah yang masih atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan sedang dalam proses balik nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yaitu tanah yang digunakan untuk rumah dinas eselon II yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Peralatan dan
Mesin
Rp12.725.410
.760.

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp12.725.410.760. dan Rp13.930.390.253. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	13.930.390.253
Mutasi tambah:	
Pembelian	43.029.400
Transfer Masuk	81.365.700
Hibah Masuk	58.000.000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(981.148.682)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(389.196.352)
Koreksi Pencatatan	(2.500.000)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(14.529.559)
Saldo per 31 Desember 2016	12.725.410.760
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(8.776.635.300)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	3.948.775.460

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pembelian senilai Rp48.029.400. adalah berupa:
 - Pembelian pompa air sebanyak 1 unit senilai Rp3.500.000.
 - Pembelian pointer sebanyak 2 unit senilai Rp1.039.400.
 - Pembelian LCD Projector/infocus sebanyak 1 unit senilai Rp4.140.000.
 - Pembelian kipas angin sebanyak 1 unit senilai Rp.450.000

Mutasi kurang peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Tranfer keluar senilai Rp981.148.682. adalah berupa:
 - ❖ Alat angkutan darat bermotor sebanyak 2 unit senilai Rp.30.758.000
 - ❖ Alat bengkel tak bermesin sebanyak 6 buah senilai Rp.9.220.200
 - ❖ Alat pengolahan sebanyak 20 buah senilai Rp.58.000.000
 - ❖ Peralatan kantor sebanyak 6 buah senilai Rp.35.475.000
 - ❖ Alat komunikasi sebanya 1 buah senilai Rp.20.000.000
 - ❖ Peralatan komputer sebanyak 30 buah senilai Rp.827.695.482
2. Koreksi pencatatan senilai Rp.2.500.000 adalah berupa;:
 - Sumur 1 buah senilai Rp.2.500.000.
3. Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp.389.196.352
 - Alat bengkel tak bermesin sebanyak 1 buah senilai Rp.3.784.000
 - Alat kantor sebanyak 24 buah senilai Rp.28.947.000
 - Alat rumah tangga sebanyak 146 buah senilai Rp.95.093.701
 - Alat studio sebanyak 1 buah senilai Rp.15.000.000

- Komputer unit sebanyak 20 buah senilai 206.696.194
 - Peralatan komputer sebanyak 25 buah senilai Rp.39.675.457
4. Usulan barang hilang ke pengelola senilai Rp.14.529.559
- Komputer unit sebanyak 1 buah senilai Rp.14.141.220
 - Peralatan komputer sebanyak 1 buah senilai Rp.388.339

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan
Rp14.869.074.051*

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp14.869.074.051. dan Rp14.620.224.051. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	14.620.224.051
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	224.350.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	24.500.000
Mutasi kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2016	14.869.074.051
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(885.624.448)
Saldo per 31 Desember 2016	13.983.449.603

Mutasi tambah gedung bangunan berupa:

1. Pengembangan melalui KDP senilai Rp.224.350.000. adalah berupa kegiatan rehabilitasi rumah dinas eselon II.
2. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp.24.500.000 adalah berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp.22.000.000 dan sumur senilai Rp.2.500.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp0.*

C.6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp22.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	22.000.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	22.000.000
Saldo per 31 Desember 2016	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	-

Mutasi kurang pada jalan, irigasi dan jaringan adalah berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp.22.000.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp167.293.209*
9

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp.167.293.209. dan Rp162.639.751. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	162.639.751
Mutasi tambah:	
Bahan Perpustakaan Tercetak	4.653.458
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	167.293.209
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	167.293.209

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp9.662.259.748*

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp9.662.259.748 dan Rp7.557.474.501. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.725.410.760	8.776.635.300	3.948.775.460
2	Gedung dan Bangunan	14.869.074.051	885.624.448	13.983.449.603
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		27.594.484.811	9.662.259.748	17.932.225.063

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp1.350.315.052.*

C.9. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.350.315.052. dan Rp521.261.552.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Mutasi :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	521.261.552
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	829.053.500
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2016	1.350.315.052
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 201	1.350.315.052

Terdapat mutasi tambah pada aset tak berwujud pada periode 31 Desember 2016 sebesar Rp829.053.500. yaitu berupa Software yang terdiri dari :

- Kapow versi 9.6 sebanyak 1 unit senilai Rp829.053.500

Tabel 16
Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	1.300.771.052
Lisensi	49.544.000
	1.350.315.052

Aset Lain-Lain
Rp63.568.384.

C.10. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp63.568.384 dan Rp169.275.028. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	Rp	169.275.028
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	389.196.352
Mutasi kurang:		
- penghentian aset dari penggunaan	Rp	(494.902.996)
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	63.568.384
Akumulasi Penyusutan	Rp	(51.310.662)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	12.257.722

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian aset dari penggunaan alat bengkel tak bermesin, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komputer unit, peralatan komputer sebesar Rp389.196.352 dan diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(840.475.440)

C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp(840.475.440) dan Rp(155.310.164)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	1.350.315.052	789.164.788	561.150.264
Software	1.300.771.052	781.733.188	519.037.864
Lisensi	49.544.000	7.431.600	42.112.400
Aset Lain-lain	63.568.384	51.310.652	12.257.732
Jumlah	1.413.883.436	840.475.440	573.407.996

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp190.591.663

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp190.591.663 dan Rp190.212.620. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga untuk periode 31 Desember 2016, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 18
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja pegawai yang belum dibayar	Rp 189.431.663
2	Langganan rekening air	Rp 1.025.000
4	Langganan koran	Rp 135.000
Total		Rp 190.591.663

Ekuitas
Rp18.993.056.055.

C.13. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.993.056.055. dan Rp22.395.613.724.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

**Pendapatan
PNBP
Rp7.188.200.**

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp7.188.200. dan Rp36.574.260. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015*

URAIAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	1.590.000	3.000.000	(47,00)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	5.598.200	6.424.260	(12,86)
Pendapatan Jasa	-	27.150.000	(100,00)
Jumlah	7.188.200	36.574.260	(80,35)

Pendapatan dari pengelolaan BMN yaitu berasal dari hasil penjualan buku publikasi BPS senilai Rp1.590.000. sedangkan pendapatan dari pemanfaatan BMN yaitu berasal dari sewa rumah dinas senilai Rp5.598.200.

**Beban
Pegawai
Rp5.325.428.780**

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.325.428.780 dan Rp4.531.594.331. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 20
Rincian Beban Pegawai periode TA 2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.039.366.846	1.693.718.637	20,41
Beban Tunjangan-Tunjangan	3.000.692.334	2.583.565.344	16,15
Beban Uang Makan	285.369.600	234.297.350	21,80
Beban Lembur	-	20.013.000	(100,00)
Jumlah	5.325.428.780	4.531.594.331	17,52

**Beban
Persediaan
Rp595.994.069**

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp595.994.069 dan Rp Rp415.026.944. Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	421.774.069	415.026.944	1,63
Beban Persediaan Bahan Baku	174.220.000	0	100,00
Jumlah	595.994.069	415.026.944	43,60

**Beban Barang
dan Jasa
Rp1.639.138.
238**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.639.138.238 dan Rp2.495.061.207. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Beban Jasa periode Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	601.243.269	592.398.200	1,49
Beban Barang Non Operasional	673.973.445	1.540.460.922	(56,25)
Langganan Daya dan Jasa	255.811.524	288.702.085	(11,39)
Beban Sewa	25.860.000	11.000.000	135,09
Beban Jasa Profesi	10.720.000	62.500.000	(82,85)
Beban Jasa Lainnya	71.530.000	0	100,00
Jumlah	1.639.138.238	2.495.061.207	(34,30)

Beban Pemeliharaan
Rp298.404.984.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp298.404.984. dan Rp350.357.946. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72.679.650	65.977.490	10,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.094.834	274.278.456	(23,04)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	14.630.500	10.102.000	44,83
Jumlah	298.404.984	350.357.946	(14,83)

Beban Perjalanan Dinas
Rp889.299.831

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp889.299.831 dan Rp1.935.268.383. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	390.800.831	509.104.383	(23,24)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	78.000.000	276.175.000	(71,76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	407.695.000	1.149.989.000	(64,55)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.804.000	0	100,00
Jumlah	889.299.831	1.935.268.383	(54,05)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.677.233.217

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.677.233.217 dan Rp2.187.960.215. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2016	THN 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.219.300.941	1.892.529.758	17,27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	306.396.870	292.258.864	4,84
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	220.000	440.000	(50,00)
JUMLAH PENYUSUTAN	2.525.917.811	2.185.228.622	15,59
Beban Amortisasi Software	144.653.862	0	100,00
Beban Amortisasi lisensi	4.954.400	0	100,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	1.707.144	2.731.593	(37,50)
Jumlah	2.677.233.217	2.187.960.215	22,36

D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp3.513.150.

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	THN 2016	TAHUN 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.600.000	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	2.995.000	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasn Aset Non Lancar	605.000	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.196.275	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Lainnya	288.125	-	-
Juumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.908.150	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.513.150	-	-

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp22.395.613.724*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp22.395.613.724 dan Rp19.312.096.924.

*Defisit LO
Rp(11.414.979.769)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit Laporan Operasional; untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp11.414.979.769 dan Rp11.920.173.071. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0).*

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp92.690.028. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp(731.908.299)*

E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp(731.908.299) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 27

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(92.351.783)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain	(639.556.516)
Jumlah	(731.908.299)

*Transaksi Antar Entitas
Rp8.744.148.399*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.744.148.399 dan Rp15.006.379.899. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 28

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	10.788.200
Ditagihkan ke Entitas Lain	(8.811.973.540)
Transfer Masuk	(1.036.844.333)
Transfer Keluar	1.151.881.274
Pengesahan Hibah Langsung	(58.000.000)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(8.744.148.399)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp10.788.200 sedangkan DKEL sebesar Rp(8.811.973.540).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp(1.036.844.333) terdiri dari:

Tabel 29

Rincian Transfer Masuk/Keluar Tahun 2016

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	BPS RI	81.365.700
3	Persediaan	BPS Provinsi Gorontalo	955.478.633
	Jumlah		1.036.844.333

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.151.881.274 yang merupakan transfer Persediaan kepada BPS Kabupaten dan Kota.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp58.000.000-. dari total Rp58.000.000,- yang diterima sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Rincian Hibah Barang Tahun 2016

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	DIPERTA	Barang	Rp 58.000.000
Total Pengesahan			Rp 58.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir
Rp18.993.056.
055*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp18.993.056.055 dan Rp22.395.613.724.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Hibah Barang

F.1 PENJELASAN ATAS HIBAH BARANG

BPS Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 memperoleh Hibah Barang berupa alat Ubinan sebanyak 20 unit dengan nilai sebesar Rp58.000.000. Hibah Barang tersebut berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Gorontalo dengan BA Serah Terima Barang nomor : 520/633/PTPH-SEK/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016.

Kerjasama

F.2 Kerjasama

Pada tahun 2015 BPS Provinsi Gorontalo melakukan beberapa kerjasama dengan instansi lain yaitu sebagai berikut :

Tabel 31
Daftar Kerjasama dengan Instansi Lain

No	Instansi	Bentuk Kerjasama	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Gorontalo	Swakelola	Rp 365.937.000	Rp 347.312.106	Penyusunan Tabel Input-Output (I-O) Provinsi Gorontalo
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Gorontalo	Swakelola	Rp 121.862.500	Rp 93.330.000	Potret Pembangunan Di Pedesaan/Kecamatan Berbasiskan Pembangunan Manusia

Kerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Gorontalo menggunakan mekanisme Swakelola berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 01Bappeda-UPTB/PK/I/2016;7500.110 berupa Penyusunan Tabel Input/Output (I-O) Provinsi Gorontalo.

Kerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Gorontalo menggunakan mekanisme Swakelola berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 410 Tahun 2016 berupa Potret Pembangunan Di Pedesaan/Kecamatan Berbasiskan Pembangunan Manusia.

**Pengungkapan
lain-lain**

F.3 Pengungkapan Lain-Lain

Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 415/PA/2014 tanggal 2 Desember 2014 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2015 di Wilayah Provinsi Gorontalo
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No.011/Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2015
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No.014/Tahun 2015 tanggal 4 Januari 2016 tentang Bendahara Pengeluaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Eko Marsoro
Pejabat Pembuat Komitmen	: Zainudin N. Taniyo
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Wiesye J. Damal
Bendahara	: Sity Defriani Djou

Lampiran A1

**Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Rincian Nilai
Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2015	per 31-12-2016	per 31-12-2016	per 31-12-2016
A	Tanah						
1	Tanah	-	510.389.050	-	-	-	510.389.050
	Jumlah		510.389.050	-	-	-	510.389.050
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	5	1.189.750.766	177.589.340	169.964.395	347.553.734	842.197.032
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.493.318.080	1.211.000.200	113.881.138	1.315.966.722	177.351.358
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	2.700.000	2.025.000	675.000	2.700.000	-
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	16.612.000	5.445.200	3.322.400	4.983.600	11.628.400
5	Alat Ukur	5	47.388.000	47.388.000	-	47.388.000	-
6	Alat Kantor	4	919.728.295	437.565.766	147.824.176	553.732.105	365.996.190
7	Alat Rumah Tangga	4	2.229.511.922	819.907.787	415.064.038	1.141.321.966	1.088.189.956
8	Alat Studio	3	111.440.671	71.197.642	12.489.899	68.687.524	42.753.147
9	Alat Komunikasi	3	44.271.500	38.251.000	8.673.500	26.924.500	17.347.000
10	Komputer Unit	3	1.630.210.218	1.155.451.705	246.801.849	1.188.077.813	442.132.405
11	Peralatan Komputer	3	5.025.499.308	3.007.030.163	1.095.486.212	4.071.809.336	953.689.972
12	Sumur	4	0	125.000	125.000	-	-
13	Peralatan Olahraga	4	14.980.000	2.496.666	4.993.334	7.490.000	7.490.000
	Jumlah		12.725.410.760	6.975.473.469	2.219.300.941	8.776.635.300	3.948.775.460
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	13.227.913.050	394.958.725	269.742.242	665.925.965	12.561.987.085
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.135.572.001	168.474.357	23.904.188	192.378.512	943.193.489
3	Tugu Tanda Batas	50	505.589.000	14.827.950	12.750.440	27.319.971	478.269.029
	Jumlah		14.869.074.051	578.261.032	306.396.870	885.624.448	13.983.449.603
D	Jalan Dan Jembatan						
1	Jembatan	40	0	3.740.000	220.000	-	-
	Jumlah		0	3.740.000	220.000	-	-
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	22.650.000	17.832.141	1.707.144	19.539.283	3.110.717
2	Alat Kantor	4	0	3.395.000	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	4	7.636.152	29.381.117	-	7.636.152	-
4	Komputer Unit	3	24.135.227	36.486.137	-	24.135.227	-
5	Peralatan Komputer	4	0	68.215.769	-	-	-
	Jumlah		54.421.379	155.310.164	1.707.144	51.310.662	3.110.717

* Beban Amortisas

Lampiran A2

**Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016**

NO	Satuan Kerja	KDP	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	% Penyelesaian	Nilai KDP (Rp)	Sumber Dana
1	BPS Provinsi Gorontalo						
Jumlah				-		-	

Lampiran A3

Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR BPS PROVINSI GORONTALO
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
 PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	DIPERTA	Barang	DN	Rp 58.000.000	Rp 58.000.000	Rp 58.000.000	
2							
3							
4							
Jumlah				Rp 58.000.000	Rp 58.000.000	Rp 58.000.000	